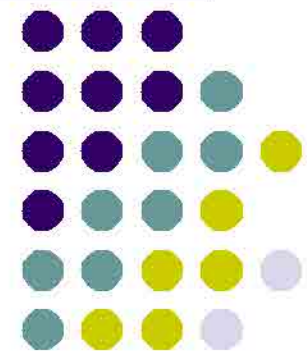


OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

**BAHAN PENATARAN UNTUK DIKLAT
APARATUR**

OLEH :

PROF.DR. SADU WASISTIONO, M[~]





MENGAPA PERLU MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK?

(Materi Power Point dari halaman 3 s/d halaman 13 dikutip dari ceramah Ketua KPK di Surabaya tanggal 12 Maret 2007 dengan judul “Pemberantasan Korupsi”).

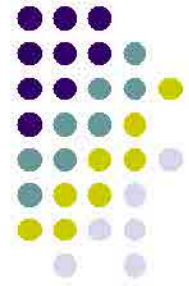


Korupsi Dilihat Dari :

- Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik
- IPK 2006 Ind 2,4, di ASEAN hanya sedikit lebih baik dari Myanmar dan Kamboja.



- PERC – Annual Graft Ranking, skor Indonesia 2006 = 8,16.
- 2004, 2005, dan 2006 terkorup se-Asia.



Indikator Korupsi

- Growth Competitiveness Index → Indonesia ranking 50 dengan skor 4,26.



- The World Competitiveness Index 2006: Indonesia ranking 60; Malaysia 23, Thai 32; Philipina 49; Singapura 3.

Institute of Management Development (IMD) Geneva

- Jumlah hari mendapatkan ijin di Indonesia → contoh waktu yang diperlukan untuk mengurus ijin-ijin tertentu di Indonesia.



- Indikator K Melakukan waktu menu persetujuan lebih lama di negara Asia

The World Bank



Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa negara

Negara	Jumlah Prosedur	Jumlah Hari	Biaya *	Modal Minimum*
Bangladesh	8	35	91,0	0,0
Kamboja	11	94	480,1	394,0
China	12	41	14,5	1.104,2
Hongkong	5	11	3,4	0,0
India	11	89	49,5	0,0
Indonesia	12	151	130,7	125,6
Korea Selatan	12	22	17,7	332,0
Laos	9	198	18,5	28,5
Malaysia	9	30	25,1	0,0
Filipina	11	50	19,5	2,2
Singapura	7	8	1,2	0,0
Sri Lanka	8	50	10,7	
Taiwan	8	48	6,3	
Thailand	8	33	6,7	
Vietnam	11	56	28,6	

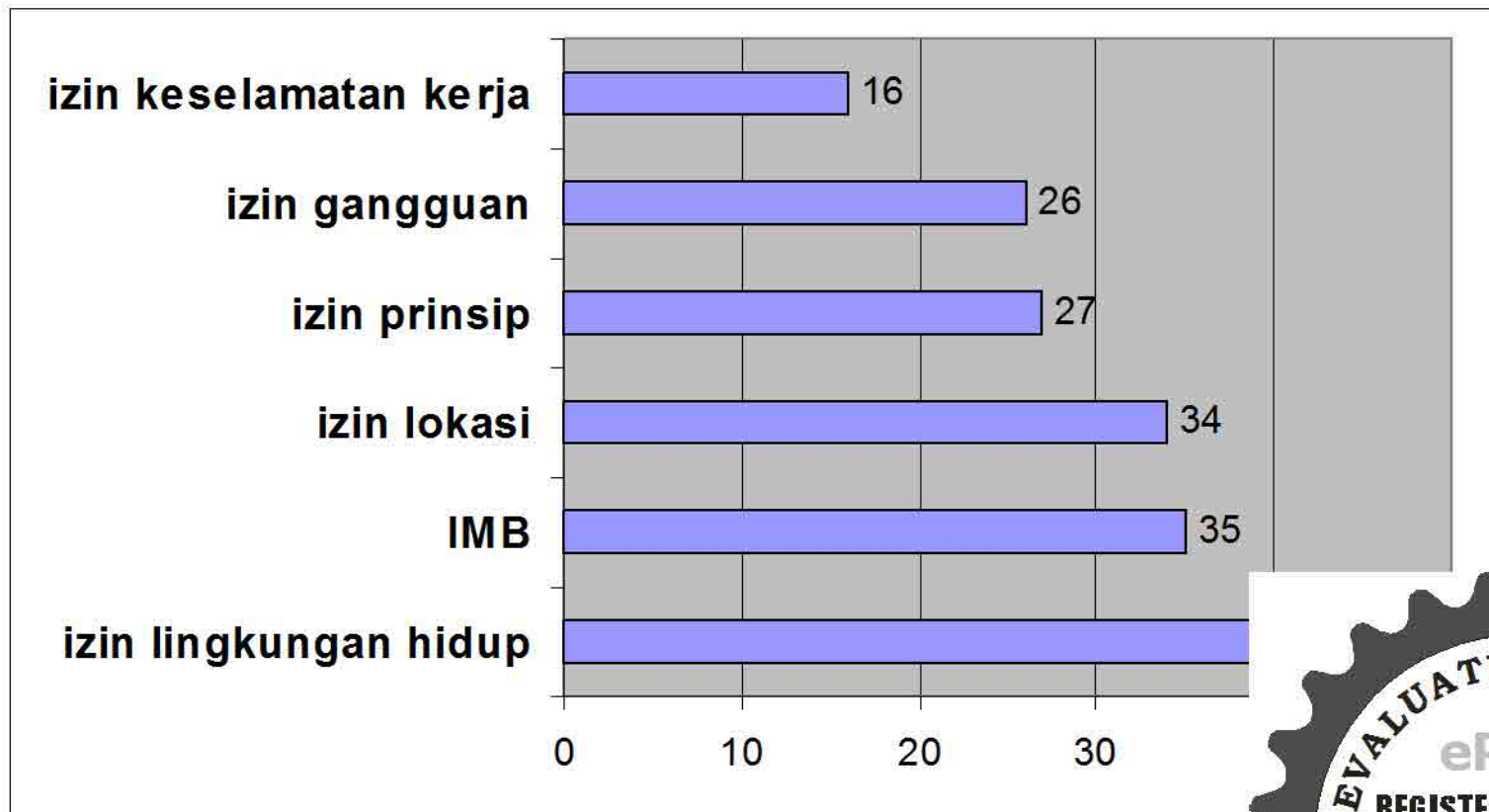
Catatan : * sebagai % dari pendapatan per kapita

Sumber : World Bank (2005), dikutip dari Purwanto (2006)





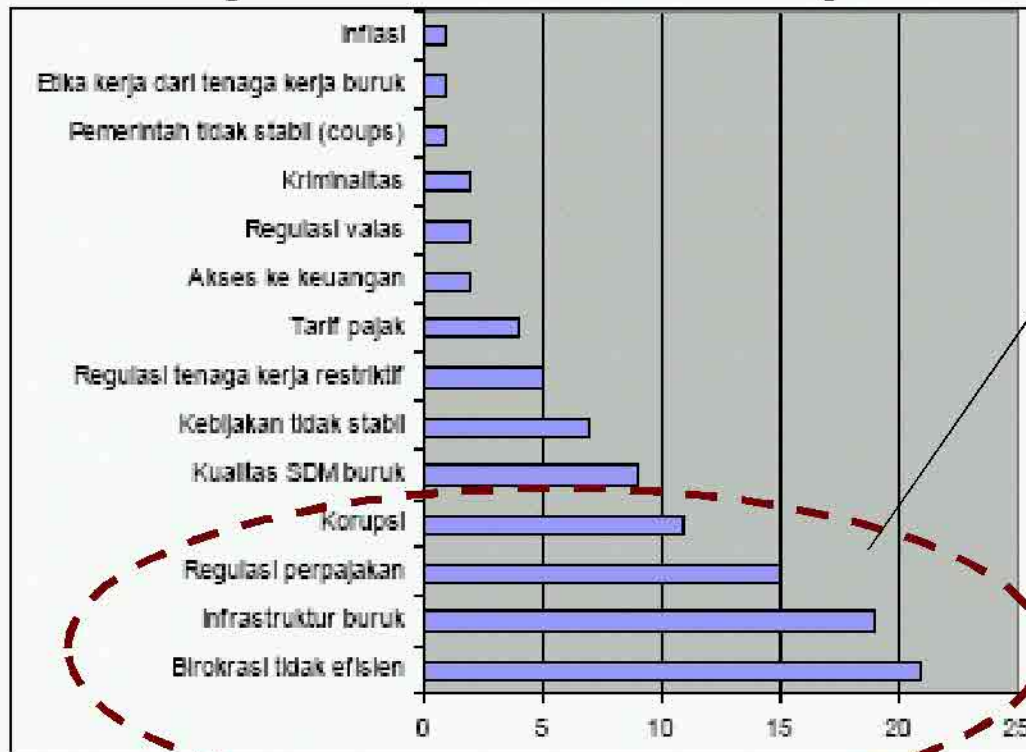
Jumlah Hari Mendapatkan Izin di Indonesia



Growth competitiveness Index (Cont.)



Faktor-faktor Penghambat Bisnis dalam *The Global Competitiveness Report 2005-2006*.



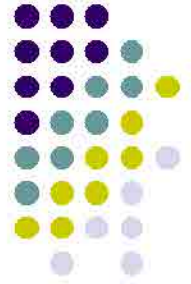
Rata-rata hasil survei →
4 faktor utama
penghambat peluang
bisnis suatu negara
adalah:

1. Inefisiensi birokrasi
2. Buruknya infrastruktur
3. Regulasi perpajakan
4. Korupsi

Publ



Indeks Persepsi Korupsi 2006 (& 2004) di 32 kabupaten/kota diurutkan dari yang tertinggi



No	Kabupaten/ Kota	IPK 2006	IPK 2004
1	Kota Palangkaraya	6.61	-
2	Kota Pare-pare	5.66	-
3	Kabupaten Tanah Datar	5.66	4.87
4	Kabupaten Wonosobo	5.66	5.63
5	Kota Yogyakarta	5.59	4.51
6	Kabupaten Solok	5.51	4.70
7	Kota Kupang	5.51	-
8	Kota Padang	5.39	4.83
9	Kota Semarang	5.28	4.17
10	Kota Ambon	5.28	-
11	Kota Makassar	5.25	5.31
12	Kota Balikpapan	5.10	4.59
13	Kabupaten Kotabaru	4.94	5.23
14	Kota Banjarmasin	4.93	5.39
15	Kota Manado	4.87	5.12
16	Kota Banda Aceh	4.69	-

No	Kabupaten/ Kota	IPK 2006	IPK 2004
17	Kota Medan	4.67	4.09
18	Kota Palembang	4.60	4.67
19	Kota Batam	4.51	4.32
20	Kota Tangerang	4.51	4.54
21	Kota Pekanbaru	4.43	4.37
22	Kota Surabaya	4.40	3.93
23	Kota Bekasi	4.27	4.61
24	Kota Larantuka	4.21	-
25	Kota Tual	4.02	-
26	DKI Jakarta	4.00	3.87
27	Kota Pontianak	3.95	-
28	Kota Cilegon		
29	Kota Denpasar		
30	Kota Gorontalo		
31	Kota Mataram		
32	Kota Maumere		



